

# Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX

Oleh: Riyadi<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*Dimulai dari Desa Sala, yakni identitas yang muncul jauh sebelum berdirinya Keraton Kasunanan, desa ini tumbuh sebagai dampak dari aktivitas perdagangan yang melewati Sungai Bengawan Sala pada masa kekuasaan Kasultanan Pajang. Pada periode berikutnya, Desa Sala berganti nama menjadi Surakarta Hadiningrat, pada masa ini wilayah tersebut tidak lagi sebagai desa namun berubah menjadi Ibu Kota Kerajaan Mataram. Setelah masuknya VOC yang diikuti Pemerintah Kolonial Belanda, Surakarta menjadi Kota Residen yang membawahi beberapa wilayah di sekitarnya. Pada masa inilah Surakarta mengalami modernisasi yang luar biasa, sehingga jati diri Surakarta tidak hanya sebagai Ibu Kota Kerajaan namun sudah menjadi kota yang multikultural. Masa kota ini membangun modernitas tidak dapat dilepaskan dari peran kolonialisme serta interaksi multi-etnis pada masa itu. Aktivitas interaksi masyarakat masa kolonial seakan-akan melukis relief yang sekarang dapat bercerita tentang masa lalu kota ini.*

**Keywords:** Surakarta, modernisasi, kolonialisme

## A. PENGANTAR

Pada artikel ini akan dibahas mengenai Surakarta yang mengalami beberapa kali perubahan nama maupun fungsi, hal ini penting dilakukan untuk melihat dinamika orang-orang asing di wilayah ini, termasuk Tionghoa. Pada periode tertentu, orang-orang Tionghoa menjadi sangat dekat dengan keraton maupun pemerintah kolonial sehingga lebih ordinan dibanding orang-orang Jawa, namun pada periode yang lain terlihat berkebalikan.

Surakarta berkembang dari sebuah desa yang bernama Sala. Nama Sala ini terbentuk ketika masa Kerajaan Pajang. Masa itu Bandar Nusupan sudah ramai dengan aktivitas perdagangan, sehingga banyak orang Jawa yang menjadi kuli pelabuhan yang dalam bahasa Jawa disebut juru *soroh bau* sedangkan pemimpinnya akrab di panggil Ki Sala atau Ki Gedhe Sala, dari nama inilah muncul nama Desa Sala.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Riyadi, M.A, Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

<sup>2</sup>Soedarmono, Kusumastuti, Rizon Pawardi Utomo, "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial – Orde Baru", *Laporan Hasil Penelitian* (Surakarta: Solo Heritage Society, 2009) hlm. 16.

Sejak Pajang berkembang menjadi sebuah pusat kekuatan penting di pedalaman Jawa Tengah, aktivitas perdagangan yang melewati jalur Sungai Bengawan Solo mulai ramai. Keruntuhan Kasultanan Demak telah membuat perekonomian Kadipaten Surabaya menjadi kuat dan lebih leluasa menguasai jalur perdagangan pesisir dan sungai. Antara pesisir dengan pedalaman dihubungkan Sungai Brantas hingga Bengawan Solo. Jalur ini merupakan jalur transportasi utama pada waktu itu, mengingat transportasi darat dari Jawa Timur hingga Sala sebelum abad ke-18 belum memungkinkan untuk dilalui. Dimulai dari Surabaya sebagai bandar pertama, bandar terakhir yakni bandar ke-44 berada di Sala yang terletak di Semanggi atau Walaya atau Walayu. Meningkatnya aktivitas perdagangan di bandar ini telah membuka kesempatan bagi pedagang Tionghoa terlibat langsung dalam sistem ekonomi masyarakat. Bersama orang Arab, para pedagang Tionghoa memasok kebutuhan masyarakat.

Berpijak pada deskripsi di atas, Sala merupakan kawasan aktivitas perdagangan yang melahirkan terjadinya kontak kebudayaan lintas etnik dan bangsa. Artefak yang tertinggal dan dapat diamati dewasa ini adalah peninggalan *heritage* kampung-kampung yang menggambarkan ciri kehidupan tertentu berdasar etnis yang tinggal di dalamnya. Beberapa perkampungan tersebut yakni: Kampung etnis Arab di Pasar Kliwon, Kampung etnis Tionghoa di sekitar Pasar Gedhe, Kampung etnis Bali di Kebalen, etnis Madura di Kampung Sampangan, etnis Banjar dan Flores di Kampung Banjaran, pedagang etnis Jawa di Kampung Sewu dan Laweyan.<sup>3</sup>

## B. MODERNISASI KOTA

Surakarta mempunyai peran penting tidak hanya sebagai kota kerajaan namun juga telah tumbuh menjadi salah satu kota kolonial yang berfungsi sebagai Karesidenan, sehingga membawahi wilayah-wilayah satelit di sekelilingnya. Sebagai Ibu Kota Kerajaan Kasunanan, Pusat Pemerintahan Mangkunegaran, dan juga sebagai Kota Karesidenan, Surakarta terus dipacu menjadi "kota" yang sebenarnya dengan cara melakukan modernisasi.

Peter Boomgaard (2004) membuat dikotomi desa dan kota dengan mendasarkan pada perkembangan ekonomi yang terjadi di satu wilayah. Desa memiliki struktur masyarakat yang bergerak dalam sektor pertanian sedangkan kota lebih heterogen, tidak hanya pertanian, namun juga salah satunya industri. Boomgaard menganggap Surakarta yang banyak dibanggakan sebagai kota pada dasarnya adalah desa, karena Surakarta di samping memiliki unsur-unsur perkotaan serta sebagai pemusatan pemukiman namun juga sebagai ibu kota agraris, sehingga kegiatan pertanian memegang peran penting dalam perekonomian.<sup>4</sup>

Boomgaard, melihat kota dan desa dari sektor agraris, sedangkan Larson lebih melihat pada perkembangan kota secara fisik dalam merumuskan konsep tentang modernisasi. Surakarta yang dibangun tahun 1745 telah mengalami banyak kemajuan seiring dengan pemerintahan feodal yang berjalan di kota itu. Dimulai dari PB II sampai dengan PB X, tidak dipungkiri setiap raja memberi kontribusi terhadap perkembangan kota dengan porsinya masing-masing, namun yang paling menonjol adalah pembangunan kota yang dilakukan oleh PB X. Pada masa pemerintahan kerajaan ini banyak menghasilkan simbol-simbol mercusuar yang kemudian dipahami sebagai representasi kebesaran raja Kasunanan. Walaupun PB X mendapatkan cap sebagai raja yang kurang cerdas oleh Residen Surakarta seperti diceritakan dalam *Memore van Overgave* (MvO) dari G. F. Van Wijk tanggal 3 April 1914 bahwa raja ini memiliki watak yang tidak keras, suka bersolek, sehingga menimbulkan kesan bahwa raja ini terlalu manja. Karena diangkat ketika masih berusia 3 tahun maka raja lebih menyukai simbol

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 1-20.

<sup>4</sup> Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djambatan, KITLV, 2004) hlm. 191-193.

kebesaran seperti tanda bintang, serta pakaian yang mewah, dari pada terlalu sibuk berkontroversi politik langsung.

Sebagai seorang raja, hampir tidak ada orang yang berani melarang kebiasaan serta kesenangan-kesenangan raja, sedangkan sebagian dari kebijakan yang diambilnya merupakan hasil bujuk rayu orang-orang disekelilingnya. Raja ini hanya mampu menulis dalam bahasa Jawa dan Melayu serta tidak dapat berhitung dengan baik. PB X sangat menyukai wanita serta makan enak, hal ini mampu membuatnya gemuk, bahkan pada waktu muda sering minum alkohol dan merokok. Satu hal yang mempunyai pengaruh politik yang besar adalah tindakan melakukan perjalanan jauh (*incognito*). PB X sering melakukan perjalanan ke luar Pulau Jawa, sedangkan tamu resmi kerajaan bahkan pernah juga Chulalongkorn dari Thailand. Residen Van Wijk juga menceritakan kebiasaan PB X yang suka meludah serta memuntahkan makanan yang ada dimulutnya kedalam tempolong ketika perjamuan makan bersama residen. Residen memberitahu secara lisan dan tertulis teguran atas perilaku Sunan sehingga ia tidak mengulangnya lagi.<sup>5</sup>

Modernisasi yang berkembang di Surakarta sangat terkait dengan perilaku penguasa di kota itu yakni Pakubuwana dan Mangkunegara. Meskipun disebutkan oleh Residen Van Wijk tentang kelemahan PB X, namun dia juga mempunyai *Emotional Intelligence* (EI) yang tinggi sehingga PB X sangat mungkin jenius dalam EI meskipun bodoh dalam IQ. Orang mengatakan bahwa kepekaan PB X luar biasa, sehingga ia akan mengenali satu suara pelan yang salah dalam sebuah irama gamelan. Keterampilannya berdansa cara Belanda tidak diragukan lagi. Dalam kehidupan sehari-hari ia sadar sebagai raja, sehingga tidak ragu-ragu menggunakan simbol-simbol meskipun simbol-simbol itu ketinggalan zaman.

Pada waktu Mangkunegaran sudah menggunakan kursi untuk beraudiensi PB X masih mengharuskan bawahannya, termasuk patih untuk duduk di bawah. Pada waktu Mangkunegaran sudah memperbolehkan pegawainya memotong rambut ketika ada gerakan memotong kucir (tau cang) bagi Orang Tionghoa di Surakarta, PB X masih bersikukuh dengan rambut gulung bagi pegawai-pegawainya.<sup>6</sup>

Sebenarnya PB X telah melakukan pembaruan yang luar biasa terhadap Kota Surakarta yang dimulai dari usaha untuk menggairahkan kehidupan kota di waktu malam hari. Salah satu bentuk pembaharuan itu yakni dibangunnya instalasi listrik dengan tenaga diesel pada tahun 1902 yang dipasang dekat Stasiun *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS)<sup>7</sup> di Purwosari. Pembangunan ini merupakan hasil patungan pemerintah Kasunanan, Mangkunegaran, para saudagar dan hartawan.<sup>8</sup> Mereka bersama-sama mendirikan perusahaan *Solosche Electriciteits Maatschappij* (SEM).<sup>9</sup> Listrik tersebut dinyalakan untuk pertama kali pada 19 April 1902.

---

<sup>5</sup> Van Wijk, MvO Residen Surakarta, 13 April 1914, hlm. 2.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan kawula* (Yogyakarta: Ombak, 2006) hlm. 9.

<sup>7</sup> NIS merupakan perusahaan yang pertama kali membangun jalur kereta api di Hindia-Belanda yakni dari Semarang-Solo pada tahun 1964. Lihat juga, Sariyatun, *loc cit.*

<sup>8</sup> Sajid, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>9</sup> Sumber tenaga listrik pertama dibangun di Jawa tahun 1897 yakni di Batavia, diikuti Surakarta 1902, Malang 1910, Pasuruan 1911, Surabaya 1912, Semarang 1913, dan Tanjung Priok 1914. sumber tenaga listrik disatukan pada tahun 1909 kedalam ANIEM (*Algemeene Nederlandsch Indische-Electriciteits-Maatschappij*) lihat Sariyatun, *Usaha Batik Masyarakat Cina di Vorstenlanden Surakarta awal abad 20* (Surakarta: UNS Press, 2005) hlm. 39.

Pada dekade pertama 1900, pelayanan kepentingan umum di Surakarta berkembang terus, yang ditandai dengan munculnya hotel, sarana ledeng, taman hiburan, benteng, museum, stadion, sekolah, tempat penjualan daging, telepon dan fotograf, perpustakaan umum, dokter gigi, tempat pelelangan dan notaris. Pelayanan pos dan telegram buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 07.00 sampai dengan 18.00. Kantor Pos juga tetap buka pada hari Minggu dan hari-hari libur namun baru buka pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Surakarta ketika itu telah menjadi kota yang sibuk dan menjadi pusat perdagangan, aktivitas sosial dan religius.

Dalam rangka mendukung arus perdagangan, jalan-jalan di pusat kota dibuat luas dan baik, terutama di daerah Residensi Eropa. Jembatan-jembatan yang ada di jalan raya sangat bagus.<sup>10</sup> Sedangkan untuk memperlancar arus ekonomi dari timur PB X membangun jembatan Jurug di atas Sungai Bengawan Solo. Di wilayah bagian selatan yang menghubungkan Surakarta dengan Sukoharjo juga dibangun jembatan di daerah Bacem. Pembukaan jembatan tersebut dilakukan pada tahun 1915.<sup>11</sup>

Modernisasi yang ada di Surakarta sejak adanya eksistensi Belanda mulai di bangun jalur transportasi kereta api di awal tahun 1862, dari Semarang menuju *Vorstenlanden* yang melalui Karangjati, Kedungjati, kemudian Surakarta, sebagian lain dari Karangjati, Ambarawa, kemudian Yogyakarta. Pengelolaan jalur kereta api tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda yaitu *Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij* (NIS). Dalam pembangunan tersebut dipekerjakan kuli Jawa dan Tionghoa. Di antara kedua kelompok pekerja itu terdapat perbedaan dalam pembayaran upah, umumnya kuli Tionghoa dibayar lebih tinggi dari pada kuli Jawa. Jalur kereta api tersebut digunakan untuk mengangkut gula dari Surakarta ke Semarang.<sup>12</sup>

Untuk mendukung kelancaran transportasi di daerah perkotaan, tersedia kereta trem untuk umum. Pembangunan trem di Surakarta untuk angkutan umum dilakukan sekitar tahun 1900 yang dimulai dari pusat kota, yaitu halte depan Benteng Vastenburg. Trem ini ditarik dengan kuda yang setiap pos akan berhenti untuk naik turun penumpang. Tujuan akhir dari trem ini adalah Stasiun Purwosari yang telah lebih dulu dibangun sejak 1875. Pemberhentian trem tersebut yakni di Derpoyudan, Pasar Pon, dan Sriwedari. Para penumpang trem tersebut adalah orang-orang Cina dan Eropa karena hanya dapat menampung 20 orang saja serta tarif yang mahal.

Pembangunan jalur kereta api ini mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kota menuju modernisasi. Kereta api telah merubah penggunaan sumber energi dari hewan ke mesin. Meskipun demikian, unsur diskriminasi etnis dan sosial sebab tidak semua orang dapat menggunakan fasilitas ini dengan bebas karena mahalnya ongkos naik kereta saat itu, sehingga hanya orang-orang Eropa dan kaum bangsawan saja yang dapat bepergian dengan fasilitas ini. Bagi kaum pribumi yang mampu menjangkau fasilitas ini mendapatkan perbedaan dalam pelayanan. Untuk kaum pribumi gerbong yang disediakan lebih sedikit sehingga harus digunakan melebihi kapasitas. Sementara orang Eropa dan kaum bangsawan dapat duduk dengan leluasa, menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Hal ini semakin terlihat jelas dari lokasi stasiun yang berada di wilayah pemukiman Eropa. Stasiun Purwosari terletak di

---

<sup>10</sup> Van Wijk, *op. cit.*, hal. 48. Pemeliharaan jalan raya dilakukan dengan kerja bebas dan dibiayai dengan uang "Pajak Jung". Di Surakarta tidak ada pembagian yang baik antara jalan Gubernur dan Kasunanan.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 50. Pemerintah memutuskan bahwa tol di Bacem hanya boleh dilakukan selama biaya pembangunan belum kembali semuanya. Lihat pula, Sajid, *op. cit.*, hal. 68.

<sup>12</sup> Joko Suryo, "Sejarah sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900", Benny Juwono, "Etnis Cina Di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", dalam *Lembaran Sejarah*, "Masyarakat Indonesia pada masa Kolonial", Vol. 2, No. 1, 1999 (Yogyakarta: UGM, 1999) hlm. 56.

dekat pemukiman Eropa dan etnis Cina di sepanjang jalan poros utama (sekarang Jalan Slamet Riyadi). Stasiun Balapan terletak di dekat pemukiman Eropa yaitu di Villapark.

Setelah menggunakan lokomotif, perjalanan kereta trem diperluas hingga Jebres dan berhenti di Stasiun Kota Sangkrah hingga melewati Bengawan Solo, yakni Desa Kronelan terus ke selatan sampai Baturetno. Ke arah barat diperluas hingga Stasiun Boyolali. Kereta yang melayani perjalanan Boyolali-Solo-Baturetno bolak-balik merupakan milik perusahaan NIS. Sarana kendaraan lainnya adalah kereta, dokar, andong atau gerobak. Pada tahun 1901 di Surakarta tercatat ada 572 buah gerobak.<sup>13</sup>

Secara fisik modernisasi kota Surakarta pada awal abad ke-20 memang sangat pesat bahkan mampu dikatakan secara viariatif Surakarta hampir sejajar dengan Batavia, karena sarana yang ada di kedua kota itu hampir serupa.<sup>14</sup> Sebuah sumber lain mengatakan, bahwa Kota Surakarta secara tidak disadari berkembang menjadi kota mengikuti pola pemukiman Belanda. Tipe ini dapat dilihat pada Kota Batavia (1619) yang berkembang dari sebuah loji kecil, menjadi kota faktori, dan kota dagang besar. Jenis pertama ini muncul untuk menjalankan fungsi sebagai kota pertahanan bagi markas besar VOC di Asia yang di ikuti dengan pendirian kantor kerja dan tempat tinggal untuk mengelola usaha multi nasional di sebuah kawasan yang jauh dari tanah air. Tipe pemukiman semacam Batavia, namun lebih kecil juga dibangun di Colombo (1656), Kaapstad (Captown, 1666), dan Paramaribo (1667).<sup>15</sup>

Jenis kedua muncul dalam pembangunan dan pelebaran jaringan untuk kota dagang di mana *faktori* didirikan dan perbentengan untuk pertahanan dirancang. Pendirian pos dagang itu pertama terjadi di sepanjang pantai utara Jawa (Cirebon, Tegal, Semarang, Jepara, dan Surabaya), dan kemudian melebar menuju kota-kota strategis di pedalaman. Gambaran ini dapat dilihat pada dibangunnya Benteng VOC yang melebar dari Ungaran (*Fort Ontmoetinge*), Salatiga (*Fort Herstellig*), Ampel (*Fort Veldwachter*), Kartasura, dan Sala (*Grootmoedingheid*).<sup>16</sup>

### C. KOTA KOLONIALISME

Sejarah Surakarta masa kolonialisme mengawali masa modernisasi kota secara besar-besaran. Interaksi Jawa-Eropa sudah dimulai ketika Masa Mataram terbelit permasalahan peperangan baik itu tentang suksesi kepemimpinan maupun pemberontakan-pemberontakan kadipaten yang terus meningkat, disamping itu juga sejak abad ke-17 mulai muncul kekuatan ideologi baru yang diwakili kelompok santri.<sup>17</sup> Beberapa raja Mataram, memilih bersekutu dengan kekuatan VOC untuk meredam berbagai bentuk peperangan. Tentu saja bantuan VOC

---

<sup>13</sup> Sariyatun, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>14</sup> George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan politik di Surakarta 1912-1942* (Yogyakarta: UGM Press, 1990) hlm. 50-58.

<sup>15</sup> Susanto, "Surakarta: Tipologi Kota dagang", dalam Sri Margana dan M. Nursam, *Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Ombak, 2010) hlm. 38.

<sup>16</sup> Roorda, *Javaansche Wetten (Serat Angger-Anggeran Jawi)* (Yogyakarta: Kepel, 2002) hlm. 132.

<sup>17</sup> Peran ulama atau santri sudah terjadi ketika kerajaan Demak, berlanjut ke Kerajaan Pajang, hingga mataram, namun pada periode tersebut gerakan Islam belum lebih terlihat sebagai gerakan sosial keagamaan. Sedangkan yang terjadi pada abad ke-17, Islam lebih pada ranah-ranah politik. Hal ini disebabkan lemahnya beberapa raja Mataram dalam menghadapi kekuatan asing baik VOC maupun Belanda. Para santri senantiasa mengembangkan ide-ide politik di dalam lingkup pesantren, sedangkan pesantren lebih longgar dari aturan kerajaan kalau tidak bisa dikatakan otonom.

harus dibayar mahal dengan penyerahan sebagian wilayah serta beberapa hak istimewa yang mengakibatkan berkurangnya otoritas kerajaan. Hubungan raja dengan VOC tidak serta-merta mendapatkan persetujuan dari keluarga kerajaan, sehingga seringkali membuat perpecahan intern dikalangan *pengageng* di lingkup Kerajaan Mataram. Modernisasi birokrasi, mulai tumbuh sejak berdirinya Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755, kemudian diikuti dua tahun setelahnya berdiri Kadipaten yang otonom, yakni Mangkunegaran, serta 1813 dengan kasus yang sama dengan Mangkunegaran, berdirilah Pakualaman.<sup>18</sup>

Di Surakarta terdapat tiga pemerintahan yang berbeda, yaitu Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Residen Belanda. Kasunanan Surakarta membawahi enam kabupaten, yakni Kota Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel, dan Sragen serta satu Kawedanan, yaitu Larangan. Kadipaten Mangkunegaran membawahi tiga Kawedanan, yaitu Ibu Kota, Karanganyar, dan Wonogiri. Sementara itu Belanda membawahi 5 *deel* (bagian) yang berada di Kasunanan dan Mangkunegaran. Surakarta yang luasnya 24 km<sup>2</sup>, sebagian adalah milik Kasunanan, seperlimanya milik Mangkunegaran, dan sisanya merupakan wilayah administrasi Belanda, yaitu di sekitar kantor Residen, benteng dan Tangsi Militer.<sup>19</sup> Wilayah administrasi Kasunanan di Surakarta terdiri dari 5 *kanewon* (subdistrik), yaitu *Kutha*, Laweyan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Serengan. Wilayah administrasi Mangkunegaran hanya satu yaitu *Kawedanan Salebething Kitha* yang terdiri dari dua *kanewon*, yaitu Kampung Lor (Stabelan, Margareja, dan Pasar Legi), dan Kampung Kidul (Keprabon, Kethelan, dan Pethelan). Batas antara wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran di dalam kota adalah jalan memanjang timur-batang yang membelah kota.<sup>20</sup> Karesidenan Surakarta yang berluas 6.159, 78 Km<sup>2</sup> sampai dengan awal abad ke-20 Kasunanan terdiri dari 23 Distrik dan 101 Onderdistrik, yang terbagi menjadi 1.240 Kelurahan, sedangkan Mangkunegaran dibagi 7 Distrik dan 32 Onderdistrik yang terbagi 750 Kelurahan.

Modernisasi yang dilakukan oleh Orang Eropa pada era kolonial disebabkan oleh sikap mempertahankan desain kota dengan sistem modern (tipe Eropa) yang dilengkapi jaringan komunikasi (seperti: telepon dan Koran);<sup>21</sup> transportasi (seperti: kereta api, jalan darat, dan trem); supra struktur ekonomi (seperti: bank, rumah gadai); sarana penunjang kota (seperti: gereja, sekolah, lapangan olah raga, societieit, gedung teater). Selain itu juga di dukung fasilitas pelayanan umum (seperti: apotek, rumah sakit, kantor pos dan telegraf), serta sarana rekreasi kota, seperti: Taman Balai Kambang, Tirtanadi, Taman Botani Partini Tuin, Partinah Bosch, dan Partimah Park.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002) hlm. 8-9.

<sup>19</sup> Nurhadiatmoko, "Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial", dalam Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998* (Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil, 2007) hlm. 16-18.

<sup>20</sup> Soedarmono, "Surakarta Kota Kolonial", *Laporan Penelitian* (Surakarta: LPPM UNS, 2004) hlm. 17.

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. ix. Di Surakarta pada kurun waktu 1915 setidaknya terdapat 4 koran Jawa, yaitu *Darmo Kando*, *Djawi Kando*, dan *Bromartani*. Ada 2 koran Cina *Ik Po* dan *Pewartu*. Satu koran Belanda, *De Nieuwe Vorstenlanden*. Ada dua majalah Melayu, yaitu *Soerotomo* dan *Doenia Bergerak*.

<sup>22</sup> Soedarmono, "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde baru", *Makalah Seminar*, 21 Agustus 2004 (Surakarta: Solo Heritage Society) hlm. 10.

Adanya Residen Belanda yang menetap di Surakarta juga mempengaruhi sikap penguasa Kasunanan untuk menjaga legitimasinya atas Surakarta. Terdapat perbedaan yang cukup tajam sebelum kedatangan Belanda dengan setelah Belanda memiliki eksistensi di Surakarta. Ketika sebelum kedatangan Belanda, hegemoni keraton (ketika itu masih Mataram) memiliki kekuasaan politik yang absolut serta pemerintahan feodal dapat dilakukan keraton secara penuh, sedangkan setelah Belanda datang keraton bukan satu-satunya pengambil kebijakan di Surakarta sedangkan kepemilikan tanah sebagian diatur Belanda. Untuk menangani hal itu, keraton menggunakan simbol-simbol sosial sebagai perekat legitimasinya.

Kuntowijoyo (2001), membedakan secara tegas antara Raja, Priyayi, dan *Wong Cilik*, serta uraian yang menegaskan betul jarak sosial yang dibangun diantara mereka serta betapa kecilnya mobilitas sosialnya di antara ketiga lapisan itu. Apa yang terjadi di Kasunanan tidak selalu identik dengan Mangkunegaran meskipun secara geografis, jarak kedua pusat kekuasaan ini berdekatan, Mangkunegara lebih mampu mengembangkan etos ekonomi yang sangat pesat dibanding Kasunanan.<sup>23</sup> Terlihat masa berkuasanya Mangkunegara VI dan VII, telah berhasil dibangun perkebunan serta pembangunan sarana perkotaan yang dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, sebab perkembangan dunia menuntut masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan sarana dalam bidang pendidikan dilakukan Mangkunegara VII dengan melanjutkan pengelolaan Sekolah Siswo Mangkunegaran dan *Studiefonds*, serta memprakarsai berdirinya Sekolah Siswarini dan Sekolah Van Deventer. Selain sekolah formal, Mangkunegaran juga memperkenalkan pendidikan non formal berupa les-les bahasa asing, khususnya bahasa Belanda dan kursus keterampilan seperti: menjahit, melukis, membuat patung, sungging dan mengukir.

#### D. PENDIDIKAN

Dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah formal dibawa oleh misi Kristen, sedangkan Katholik bernama *zending*. Mulanya misi ini ditolak oleh Keraton Kasunan Surakarta tetapi diterima oleh Kadipaten Mangkunegaran. Setelah mendapat izin dari Mangkunegaran, mulailah berdiri sekolah-sekolah dari misi *zending* yang kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah lain, terutama di wilayah Mangkunegaran. Umumnya sekolah-sekolah ini bercorak Eropa, sedangkan sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kasunanan umumnya bercorak lebih klasik.

Pada awalnya sekolah-sekolah hanya berdiri di lingkungan Keraton, khusus bagi keluarga Keraton. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan Pemerintah Kolonial, sekolah-sekolah mulai banyak bermunculan dan umumnya di wilayah Mangkunegaran. Sekolah-sekolah ini ternyata juga dibagi berdasarkan strata sosial, seperti sekolah bagi orang Eropa, sekolah bagi orang Timur Asing, dan sekolah bagi orang Pribumi. Bagi orang pribumi kaya, mereka bisa leluasa menentukan sekolah, termasuk adalah orang Tionghoa. Umumnya sekolah Tionghoa lebih bagus dari pada sekolah pribumi. Letak sekolah ini pun dekat *wijk-wijk* Tionghoa, salah satu diantaranya adalah *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK) yang didirikan oleh Mayor We Kwat Kum tahun 1903.<sup>24</sup> Didirikannya sekolah Tionghoa telah menimbulkan kekhawatiran Pemerintah Kolonial Belanda terhadap perkembangan gerakan Cina di Hindia Belanda, sehingga didirikanlah sekolah untuk anak-anak Tionghoa dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, *Holland Chinese School* (HCS) pada tahun 1908.

---

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, "Lari Dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan *Wong Cilik* Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915", dalam *Humaniora*, Volume XV, No.2/2003 (Yogyakarta: FIB-UGM, 2007) hlm. 207.

<sup>24</sup> Soedarmono, "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde Baru", *op. cit.*, hlm. 14-15, THHK di masa sekarang menjadi Yayasan Warga Surakarta. Pendirian THHK diikuti pendirian *Holland Chinese School* (HCS) oleh pemerintah Belanda pada tahun 1908, yang ditujukan untuk orang Tionghoa. HCS diselenggarakan dengan sistem pendidikan Eropa.

Selain bidang pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan dibawa oleh misi *zending* dengan membuka rumah sakit di Jebres. Rumah Sakit ini semula bernama Rumah Sakit Pusat tetapi sekarang bangunannya sudah tidak ada karena tanahnya menjadi milik perseorangan. Kemudian Rumah Sakit Mangkubumen dijadikan satu dengan Rumah Sakit Dr. Moewardi di Jebres. Rumah sakit Mangkubumen terletak dekat barak militer Belanda. Selain rumah sakit milik *zending* di wilayah Mangkunegaran dibuka pula klinik kesehatan yang terletak di sebelah barat Pura Mangkunegaran dan selain rumah sakit dalam kota juga dibangun klinik di wilayah perkebunan.<sup>25</sup>

## E. MODERNISASI MENTALITAS

Modernisasi fisik juga diikuti pula dengan perkembangan kehidupan sosial seperti klub-klub atau perkumpulan bagi warga Eropa, Tionghoa, dan pribumi kaya. Klub bagi orang-orang Eropa bernama Societeit Harmonie terletak di sebelah timur laut Benteng Vastenberg atau utara Loji Wetan. Pengunjung klub ini adalah para priyayi, pribumi kaya, dan orang Timur Asing termasuk Tionghoa.<sup>26</sup>

Pembangunan sarana dalam bidang irigasi ditandai dengan adanya perbaikan sistem irigasi di pabrik gula milik Mangkunegaran. Untuk meningkatkan produksi pangan dibangun sarana irigasi karena daerah Praja Mangkunegaran bagian selatan (Wonogiri) terdiri dari daerah yang berbukit-bukit dan hutannya telah mengalami kerusakan. Sebagai akibatnya ketika hujan, airnya tidak sempat tersimpan oleh tanah. Pada musim kemarau keadaan tanah menjadi kering kerontang, akibatnya tanah itu tidak dapat ditanami. Selama lima tahun Dinas Irigasi Praja (*Rijk Waterstaat*) yang dipimpin oleh seorang arsitek Belanda, bernama F.E Wolf telah mendirikan sejumlah sarana perairan di wilayah Praja Mangkunegaran. Adapun bangunan ini ialah: Temon, Wiroko, Kebon Agung, Kedung Uling, dan Plumbon.<sup>27</sup>

Hadirnya *kompeni* di Kerajaan Kasunanan, meskipun berada di pinggiran, dan belum sampai pada titik permusuhan kultural,<sup>28</sup> tetapi pengaruh *kompeni* telah menjadi faktor perusak terhadap kesatuan politik Kerajaan.<sup>29</sup> Pada dasarnya kekuatan *kompeni* sangat terbatas dan mengandalkan kekuatan yang dimiliki raja-raja Kasunanan. Pada saat yang sama *kompeni* terlibat dalam intrik, faksionalisme, dan provokasi di lingkungan istana dalam persoalan suksesi. Pemerintahan di Karesidenan Surakarta terjadi tumpang-tindih, yakni pemerintahan Kasunanan dan Pemerintahan Belanda, meskipun Kasunanan pada dasarnya tetap di bawah kekuasaan Residen Surakarta.

---

<sup>25</sup> Soedarmono, dkk. "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde baru", *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 17., di Surakarta terdapat pula perkumpulan priyayi yang bernama Abipraya. lihat pula Kuntowijoyo, "Lari Dari Kenyataan: Raja, Priyayi dan *Wong Cilik* Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915.", *Humaniora*, Volume XV, No. 2/ 2003 (Yogyakarta: FIB UGM, 2003) hlm. 204.

<sup>27</sup> Nina Astiningrum, "Kebijakan Mangkunagara VII dalam Pembangunan Perkotaan di Praja Mangkunegaran Tahun 1916-1944", makalah tidak diterbitkan.

<sup>28</sup> Ricklefs melihat bahwa intervensi Belanda abad XVII dan XVIII dalam kerajaan-kerajaan tradisional harus dilihat dalam konteks sejarah yang sesuai, dan berbeda dengan abad-abad berikutnya (XIX dan XX). Pada abad XVII dan XVIII keterlibatan *kompeni* hanya di pinggiran saja. Pro dan kontra tentang kehadiran *Kompeni* Belanda belum menimbulkan perasaan konflik kultural antara penguasa, pemimpin agama, masyarakat pribumi, dan *Kompeni* Belanda.

<sup>29</sup> B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Part Two (The Hague & Bandung: W. van Hoeve, 1957) hlm. 97-101.



Modernisasi Surakarta sebagai kesatuan entitas perkotaan, tidak hanya sebatas pembangunan struktur fisik atau birokratisasi Kerajaan maupun pemerintah kolonial, namun juga perkembangan mentalitas. Pada awal abad ke-20 ditandai bangkitnya kesadaran akan orientalisme, beberapa tokoh mencuat bersamaan dengan berkembangnya organisasi yang diusungnya. Salah satu diantaranya adalah Marco Kartodikromo dengan SI, serta Hadji Misbach dengan ideologi sosialisme. Melalui novel *Student Hidjo* yang ditulis Marco, telah didapati semangat orientalisme yang disalurkan melalui SI. Salah satu fragmen dari buku itu, disebutkan

*“...tempat vergadering SI di sini sudah beratus-ratus orang yang hendak sama mengunjungi vergadering, semua itulah utusan cabang Sarekat Islam seluruh tanah Jawa. Muziek yang berbunyi di tempat vergadering itu semakin membikin gumbira hatinya orang-orang Islam yang ada di situ. Bangsawan kraton Solo, saudagar, priyayi Gouvernement dan orang-orang particulier, mereka semua sama menunjukkan kecintaanya masing-masing. Lantaran pengaruhnya sarekat Islam, itu waktu tidak ada perbedaan manusia, semua saudara, baik orang berderajat tinggi maupun orang yang berderajat rendah.*

*Pukul sembilan malam vergadering dibuka, dan membicarakan betapa itu perkumpulan yang besar mesti dijalankan. Di situlah mulai timbul berbentahan bicara (debatan), masing-masing bermaksud supaya perkumpulan itu membikin gentarnya tanah Hindia bisa jadi baik. Sebab Sarekat Islam memang maksudnya mulya sekali, karena akan memperbiki nasibnya orang-orang Islam yang sudah beratusan tahun diinjak-injak. Ini vergadering sampai pukul 12 baru ditutup.*

*Pukul tujuh pagi hari minggu, beribu-ribu orang sudah sama masuk di Sri Wedari. Commisaries politie dan sekalian pegawainya bersiap menjaga itu tempat yang ditempati kongres SI pun soldaku yang ada di benteng dan yang didatangkan dari Magelang buat menjaga itu perkumpulan, sudah bersedia kalau di dalam kongres itu ada kejadian perusuhan. Sepanjang jalan di kota Solo penuh dengan orang yang akan ke Sri Wedari buat melihat itu vergadering. Itu waktu seolah-olah semua anak Hindia sudah bersatu hati, dan bersama menuju ke tempat kemusiaan...”*

Sebuah kesaksian penting yang terdapat dalam buku ini, yang menunjukkan gerakan kebangsaan. Dalam buku yang sama, Marco juga mengisahkan keengganan pribumi untuk menjadi bagian dari kelas Eropa melalui perkawinan, selain itu modernisasi di Surakarta dan diskripsi negara Belanda, diceritakan detil sehingga nampak Surakarta memiliki tingkat perkembangan kota yang tidak terbelakang. Di balik modernisasi, masyarakat Surakarta masih tetap memegang falsafah Jawa bahkan ini terus berlangsung hingga abad ke-21, yakni kepercayaan terhadap primbon. Dalam karya Marco, juga diceritakan meskipun Hidjo mendapat pendidikan di Belanda namun setelah pulang tetap tunduk terhadap primbon melalui keluarganya.<sup>30</sup>

Surakarta pada periode masuknya penjajahan Jepang yakni tahun 1942 tidak mengalami banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Kasunanan. Jepang hanya melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu bagi pemerintahan militernya. Bahkan pada awal pendudukannya masih menggunakan sistem pemerintahan yang pernah dijalankan oleh Belanda, untuk melancarkan arus pemerintahan pendudukan Jepang merubah sistem pemerintah feodal. Berdasarkan Undang-Undang No. 27, yaitu tentang perubahan tata pemerintahan daerah menyatakan bahwa di seluruh Jawa dan Madura Pemerintah

---

<sup>30</sup> Jacob Sumarjo, *Kesusastaan Melayu Rendah Masa Awal* (Yogyakarta: Galang, 2004) hlm. 245-250.

Pendudukan Jepang membagi daerah kekuasaan atas *Syuu, Si, Ken, Gun, Son, Ku*, dan daerah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta menjadi *Kooti*.

Kedudukan Kasunanan dan Mangkunegaran masih seperti pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Jepang masih mengakui otonomi kedua kerajaan tersebut, bahkan Jepang melantik raja dari Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai Solo Koo dan Mangkunegaran Koo. Pengambilan alih kekuasaan Belanda oleh Jepang telah membawa perubahan struktur sosial yang ada di Indonesia, demikian juga di Surakarta. Saat zaman Jepang kedudukan bangsa Indonesia mulai menempati strata yang lebih tinggi, walaupun tidak berada di strata atas yang masih di tempati oleh para pembesar Jepang, orang Indonesia telah memiliki kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan, yang di zaman penjajahan Belanda sulit sekali diperoleh. Secara umum dapat dikatakan bahwa selama pendudukan Jepang, terjadi perubahan sosial yang besar baik di kota-kota maupun di desa-desa. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang merupakan suatu cara untuk menarik perhatian bangsa Indonesia pada saat itu. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Surakarta sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari kepentingan Jepang. Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan antara lain berupa larangan terhadap organisasi politik, larangan mendengarkan radio dari musuh sehingga diadakan penyegelan radio, serta lain-lain larangan yang bersifat politik, sedangkan kegiatan yang bersifat non politik (kebudayaan dan olahraga) diperbolehkan.

## **F. PASCA KEMERDEKAAN**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah kerajaan di Surakarta ditetapkan oleh Presiden sebagai daerah istimewa. Bahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan piagam Penetapan Presiden, Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII ditetapkan sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta. Dalam waktu bersamaan, Pemerintah Republik membentuk Komite Nasional Daerah (KND) sebagai badan legislatif pada September 1945 yang secara konsensus dipimpin oleh eksponen perwira Pembela Tanah Air (PETA), Mr. Sumodiningrat.

Atas dasar konsensus itu, KND harus dipimpin oleh eksponen perwira PETA merupakan instruksi dari pemerintah pusat, karena salah satu tugas utamanya adalah melucuti senjata tentara Jepang. Sejak akhir September 1945, KND berhasil memaksa tentara Jepang menyerahkan persenjataannya. Kehadiran KND tidak didukung oleh kalangan keraton baik Kasunanan dan Mangkunegaran. Maka, praktis antara bulan September sampai Oktober 1945 berdiri tiga pemerintahan yakni Kasunanan, Mangkunegaran, dan KND. Bahkan sebuah Pemerintahan Direktorium yang terdiri dari unsur Kasunanan, Mangkunegaran dan KND tidak berjalan, karena Kasunanan dan Mangkunegaran berkeinginan berdiri sendiri.<sup>31</sup>

Situasi instabilitas di Surakarta memunculkan kelompok pro dan anti swapraja. Kelompok pro swapraja membentuk organisasi Perkumpulan Kerabat Surakarta (PKS). Pendukung PKS sebagian besar adalah masyarakat yang masih setia dengan pemerintah kerajaan. Sementara itu, kelompok yang anti swapraja muncul dari berbagai kalangan di antaranya adalah kalangan keraton yang berfikir modern, aktivis partai-partai politik seperti PKI, PNI, Murba, PSI dan organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan PKI dan Barisan Benteng Surakarta. Mereka menyatukan diri dalam Panitia Anti Swapraja (PAS).

Pertikaian antara kelompok pro dan anti swapraja terjadi berlarut-larut. Pada akhirnya, Pemerintah Pusat melalui keputusan 15 Juli 1946 mengeluarkan Peraturan Presiden No.16/SD/1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah karesidenan dalam Propinsi Jawa Tengah. Maka, sejak itu hilanglah kesempatan menjadi Daerah Istimewa. Pada bulan

---

<sup>31</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 1974) hlm. 108-109

Agustus 1946 struktur pemerintahan Karesidenan Surakarta terdiri atas kabupaten, kawedanan dan kelurahan. Karesidenan Surakarta terdiri atas wilayah Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah Kasunanan mencakup Boyolali, Klaten dan Sragen dan Wilayah Mangkunegaran yakni Wonogiri dan Karanganyar.<sup>32</sup>

Wilayah Surakarta pada tahun 1950 mendapatkan tambahan 7 kelurahan yakni Karangasem, Kerten, Jajar, Banyuanyar yang semula masuk Kecamatan Colomadu dan Kadipiro, Mojosongo yang semula masuk Kecamatan Gondangrejo. Serah terima berdasarkan No. 7640/I-Secr/50 9, September 1950 dari Residen Surakarta Prodjohardjojo kepada Wali Kota Surakarta Soebakti Poeponoto.

Peristiwa politik Surakarta merupakan perubahan struktur tradisional menjadi lebih demokratis. Dengan ini Keraton Surakarta kehilangan sumber-sumber politik dan ekonomi untuk mendukung status sosialnya. Sementara itu, Keraton hanya dapat mempertahankan aspek budaya sebagai simbol sosial kultural pusat kebudayaan Jawa.

## G. PENUTUP

Komposisi sosial, budaya dan ekonomi, serta politik yang sangat menonjol di Surakarta tampaknya telah menimbulkan problem perkotaan yang akhirnya mengarah pada munculnya dikotomi sosial yang berupa nilai sekularisasi lebih menonjol di Mangkunegaran dan potret religiusitas lebih menonjol di wilayah Kasunanan. Sementara itu pertumbuhan ekologi sosial kota muncul dis-harmoni sosial, kriminalitas, kemiskinan, serta ketimpangan sosial. Pada taraf yang lebih konkrit sebagai akibat sampingan dari permasalahan perkotaan di atas adalah munculnya eskapisme, revitalisasi nilai, serta protes sosial, yang hal itu semua tidak lain adalah perwujudan dari konflik.<sup>33</sup> Pada kondisi yang demikian terlihat segregasi yang rawan yakni antara Jawa dengan Tionghoa, sikap *in group filling* sangat mudah tumbuh jika kedua sub etnis ini berhadapan tidak dalam kondisi yang akomodatif. Kalau ada era kolonial dominasi lebih ada pada penguasa Belanda, sementara pada pascakolonial bentuk konfliknya tidak berubah, hanya saja aktor pemerannya yang berbeda, meskipun sering pula konflik muncul karena dipicu ketimpangan realitas sosial yang mengarah pada perbedaan kultural.

## DAFTAR PUSTAKA

- George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan politik di Surakarta 1912-1942* (Yogyakarta: UGM Press, 1990)
- Jacob Sumarjo, *Kesusastaan Melayu Rendah Masa Awal* (Yogyakarta: Galang, 2004)
- Joko Suryo, "Sejarah sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900", Benny Juwono, "Etnis Cina Di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", dalam *Lembaran Sejarah*, "Masyarakat Indonesia pada masa Kolonial", Vol. 2, No. 1, 1999 (Yogyakarta: UGM, 1999)
- Kuntowijoyo, "Lari Dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915", dalam *Humaniora*, Volume XV, No.2/2003 (Yogyakarta: FIB-UGM, 2007)
- Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan kawula* (Yogyakarta: Ombak, 2006)
- Nina Astiningrum, "Kebijakan Mangkunagara VII dalam Pembangunan Perkotaan di Praja Mangkunegaran Tahun 1916-1944", makalah tidak diterbitkan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Soedarmono, *loc. cit.*

- Nurhadiatmoko, "Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial", dalam Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998* (Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil, 2007)
- Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880* (Jakarta: Djambatan, KITLV, 2004) hlm. 191-193.
- Roorda, *Javaansche Wetten (Serat Angger-Anggeran Jawi)* (Yogyakarta: Kepel, 2002)
- Sariyatun, *Usaha Batik Masyarakat Cina di Vorstenlanden Surakarta awal abad 20* (Surakarta: UNS Press, 2005)
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 1974)
- Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Part Two (The Hague & Bandung: W. van Hoeve, 1957)
- Soedarmono, "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde baru", *Makalah Seminar*, 21 Agustus 2004 (Surakarta: Solo Heritage Society)
- Soedarmono, "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde Baru",
- Soedarmono, "Surakarta Kota Kolonial", *Laporan Penelitian* (Surakarta: LPPM UNS, 2004)
- Soedarmono, Kusumastuti, Rizon Pawardi Utomo, *"Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial – Orde Baru", Laporan Hasil Penelitian* (Surakarta: Solo Heritage Society, 2009)
- Susanto, "Surakarta: Tipologi Kota dagang", dalam Sri Margana dan M. Nursam, *Kota-kota di Jawa: Identiras, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Ombak, 2010)
- Van Wijk, MvO Residen Surakarta, 13 April 1914,
- Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002).